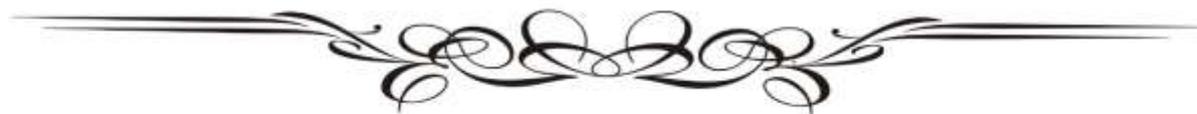


KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Jumat, 26 Juni 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Hal. 7)	Rabu, 26 Juni 2019	Trans-Jawa dan Sumatera Kian Panjang	Dua perusahaan pelat merah melanjutkan pembangunan proyek jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra.
2	Bisnis Indonesia (Hal. 9)	Rabu, 26 Juni 2019	BWS III Kalimantan Bangun Kolam Retensi	Solusi untuk banjir di hulu sungai Mahakam. Saat pembangunannya sudah dimulai
3	Bisnis Indonesia (Hal. 22)	Rabu, 26 Juni 2019	Taipan Diminta Bangun Hotel di Mandalika	Pemerintah mengundang pengusaha kelas kakap untuk membangun hotel di Mandalika
4	Republika (Hal. 1)	Rabu, 26 Juni 2019	Antisipasi Kekeringan	Sejumlah daerah berstatus siaga dan awas kekeringan
5	Media Indonesia (Hal. 10)	Rabu, 26 Juni 2019	Kalimantan Tengah Kebut Cetak Biru	Pemprov Kalteng bergerak cepat untuk memenuhi segala persyaratan menjadi ibu kota Indonesia masa depan
6	Media Indonesia (Hal. 10)	Rabu, 26 Juni 2019	Warga Konsumsi Air Sungai	Pemda perlu mengambil inisiatif dalam mengatasi dampak kekeringan yang sudah dirasakan warga di beberapa daerah
7	Tempo (Hal. 6)	Rabu, 26 Juni 2019	Berita Foto	Tebing Keraton dalam zona Patahan Lembang akan direhabilitasi untuk mengendalikan alih fungsi hutan menjadi resor wisata dan permukiman
8	Kompas (Hal. 11)	Rabu, 26 Juni 2019	Berita Foto	Waduk Botok mengering akibat musim kemarau di Kedawung, Sragen, Jawa Tengah, Kemarin
9	Kompas (Hal. 10)	Rabu, 26 Juni 2019	Sedimentasi Limboto Belum Teratasi	Pendangkalan Danau Limboto di Gorontalo masih menjadi masalah utama nelayan, berakibat penurunan tangkapan
10	Kompas (Hal. 10)	Rabu, 26 Juni 2019	Berita Foto	Polusi Udara mengepung Kota Jakarta, Selasa (25/6/2019). Kondisi udara pada rentang 201-300 bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat

Judul	Trans-Jawa dan Sumatera Kian Panjang	Tanggal	Rabu, 26 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 7)		
Resume	Dua perusahaan pelat merah melanjutkan pembangunan proyek jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra.		



► PROGRES MEGAPROYEK JALAN TOL

Trans-Jawa & Sumatera Kian Panjang

Bisnis, JAKARTA — Dua perusahaan pelat merah yaitu PT Waskita Toll Road dan PT Utama Karya terus melanjutkan pembangunan dua megaprojek jalan tol, yaitu Trans-Jawa dan Trans-Sumatra dengan realisasi panjang jalan yang makin jauh.

Rivki Maulana & Krista Putri Kinanti
redaksi@bisnis.com

PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol, anak usaha PT Waskita Toll Road (WTR) kini siap membangun seksi 4 Jalan Tol Pasuruan—Probolinggo (Paspro) sepanjang 14 kilometer. Seksi ini bakal melanjutkan tiga seksi sebelumnya sepanjang 31 kilometer, yang sudah beroperasi sejak April 2019.

Sementara itu, PT Utama Karya melanjutkan pembangunan Tol Trans-Sumatra yang kini hendak menghubungkan Palembang dan Bengkulu dengan membangun ruas Indralaya—Muara Enim dan Muara Enim—Lahat—Lubuk Linggau.

Corporate Secretary WTR Alex Siwu mengatakan, perseroan telah menyampaikan proposal penambahan ruang lingkup kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR).

Ini dilakukan sebagai bagian dari rencana

► Hingga hari ini, **Hutama Karya tengah membangun 604 km Jalan Tol Trans-Sumatra, dengan 172 km Jalan Tol Trans-Sumatra yang sudah beroperasi penuh.**

na pembangunan seksi 4 Jalan Tol Paspro. Lewat penambahan ruang lingkup, ada adendum atas perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) Pasuruan—Probolinggo yang diteken pada 2011.

"Untuk seksi 4 kami sedang proses. Ini masuk dalam penambahan ruang lingkup (pengusahaan Jalan Tol Paspro)," ujar Alex kepada *Bisnis*, Selasa (25/6).

Untuk diketahui, Tol Paspro seksi 1 hingga seksi 3 sepanjang 31 kilometer sudah beroperasi secara komersial pada April 2019. PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol sebagai badan usaha jalan tol (BUJT) yang mengusahakan ruas ini merogoh kocek Rp4,8 triliun untuk pembangunan jalan tol.

Kepala BPJT Danang Partikesit sebelumnya mengatakan bahwa pembangunan seksi 4 jalan tol Paspro bersifat prakarsa badan usaha.

Dia menjanjikan pengurusan penambahan ruang lingkup yang diajukan oleh badan usaha bakal lebih cepat. "Kalau mereka ajukan biasanya 2 tahun, tetapi kami harapkan 1,5 tahun sudah selesai untuk prakarsanya," jelas Danang.

TRANS-SUMATRA

Sementara itu, progres pembangunan Tol Trans-Sumatra yang segera menghubungkan Provinsi Bengkulu kian nyata.

Jika proyek ini diselesaikan, ruas jalan Tol Trans-Sumatra bakal bertambah panjang. Pasalnya, panjang jalan dari Palembang ke Bengkulu berkisar 351,3 km.

Untuk tahap ini, pembangunan akan ditokuskan pada ruas Indralaya—Muara Enim dan Muara Enim—Lahat—Lubuk Linggau.

Sri Hastuti Hardiningsih, Pimpinan Proyek Tol Bengkulu—Lubuk Linggau PT Utama Karya, mengatakan bahwa saat ini masih dilakukan penetapan lokasi (penlok) yang menunggu penerbitan.

"Saat ini masih dalam proses penerbitan penlok. Semoga [selesai] minggu ini," tuturnya kepada *Bisnis*, Selasa (25/6).

Dia menambahkan bahwa setelah selesai penerbitan SK penlok, maka yang akan dipercepat adalah proses pembebasan lahan, sehingga konstruksi pembangunan bisa dapat segera dimulai.

Seharusnya, lanjutnya, penerbitan SK penlok sudah dilakukan pada minggu lalu, karena telah dilakukan rapat terkait dengan pembebasan ruas tol Bengkulu—Lubuk Linggau.

Sebelumnya, Direktur Utama Utama Karya Bintang Perbowo menyampaikan bahwa tol ini akan membantu lalu lintas dari Palembang ke Bengkulu dan sebaliknya dengan lebih cepat.

"Ruas tol ini merupakan koridor pendukung, tetapi jalur ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk distribusi barang baik dari selatan maupun dari barat yaitu Bengkulu" ujarnya.

Selain itu, dia menyebutkan bahwa pembangunan ini cukup menantang karena areanya. "Pembangunan jalan tol ini juga menantang dan akan menggunakan teknologi *in-cum* *corrosification* method, karena struktur tanah di daerah Simpang Indralaya—Muara Enim berupa

rawa," ujarnya.

Sementara itu, tambah Bintang total investasi pembangunan tiga ruas jalan tol ini sendiri diproyeksikan mencapai Rp85,51 triliun, yang bersumber dari penyertaan modal negara dan pinjaman perbankan.

Ruas Tol Indralaya—Muara Enim—Lubuk Linggau sendiri merupakan 2 dari 4 ruas yang menghubungkan Palembang—Bengkulu. Adapun ruas tol Simpang Indralaya—Muara Enim akan dibangun sepanjang total 119 km, dan ruas tol Muara Enim—Lahat—Lubuk Linggau sepanjang 114,5 km.

Selain ruas tol tersebut, akan dibangun pula ruas tol Lubuk Linggau—Curug—Bengkulu sepanjang 95,8 km, yang Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ini telah ditandatangani pada 15 Maret 2019 di Bengkulu. Sementara itu, ruas tol Simpang Indralaya—Palembang sepanjang 22 km telah beroperasi sejak 2018.

Pembangunan konstruksi jalan tol Palembang—Bengkulu ini ditargetkan selesai pada akhir 2022—2023 dan dapat beroperasi penuh pada 2024.

Hingga hari ini, Utama Karya tengah membangun 604 km Jalan Tol Trans-Sumatra, dengan 172 km Jalan Tol Trans-Sumatra yang sudah beroperasi penuh.

Setelah diresmikannya ruas Baganjari—Terbanggi Besar, ditargetkan dalam waktu dekat ruas tol Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung sepanjang 199 km dapat disebut pengerjaannya dan selesai pada April 2019.

TARIF BARU

Pada sisi lain, terhitung mulai Rabu (26/6), operator mulai memberlakukan tarif jalan tol berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) No. 540/KPTS/M/2019 tanggal 18 Juni 2019.

Dengan kata lain, perlu 2 bulan bagi operator untuk melakukan sosialisasi tarif kepada pengguna jalan tol.

Tarif yang berlaku di Tol Paspro sudah mengacu pada kebijakan rasionalisasi tarif yang terdapat penyederhanaan golongan dari lima kelompok tarif menjadi tiga kelompok tarif.

Untuk kendaraan golongan I, tarif dipatok Rp25.500 sedangkan golongan II dan golongan III dipungut Rp40.000. Adapun kendaraan golongan IV—V sebesar Rp53.000.

Alex menyebut, tarif yang berlaku lebih rendah dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam PPJT. Pasalnya, tarif per kilometer yang diberlakukan di bawah Rp1.000 per kilometer. Sebagaimana diketahui, kebijakan rasionalisasi tarif tol mulai diperkenalkan sejak tahun lalu.

Saat itu, pemerintah menurunkan tarif tol menjadi Rp1.000 per kilometer untuk ruas-ruas tol baru agar tarif di lintas Trans-Jawa bisa lebih murah. Sebagai gantinya, BUJT akan mendapat kompensasi untuk menjaga tingkat pengembalian investasi yang telah dikeluarkan BUJT.

Secara umum, kehadiran Tol Paspro sebagai bagian dari Tol Trans-Jawa disebut turut mendukung kecepatan mobilitas barang, orang, dan logistik nasional terutama untuk Surabaya, Pasuruan, dan Probolinggo.

Jalan tol memangkas waktu tempuh dari Surabaya ke Probolinggo dari semula 3,5 jam menjadi 1,5 jam. Jalan tol Paspro juga menjadi penunjang bagi bagi arus kunjungan pariwisata ke kawasan wisata Bromo—Tengger—Semeru, salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). □

Judul	BWS III Kalimantan Bangun Kolam Retensi	Tanggal	Rabu, 26 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 9)		
Resume	Solusi untuk banjir di hulu sungai Mahakam. Saat pembangunannya sudah dimulai		

► BANJIR SAMARINDA

BWS III Kalimantan Bangun Kolam Retensi

Bisnis, SAMARINDA — Balai Wilayah Sungai Kalimantan III memastikan sudah ada penyedia untuk kegiatan pembangunan Kolam Retensi Sempaja.

Gerla FK Lawi
gleria.franisca@bisnis.com

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, Anang Muchlis menyatakan pihaknya telah mendahului pekerjaan pembangunan embung serba guna Sempaja Kota Samarinda, atau Kolam Retensi Sempaja guna menanggulangi banjir dari anak Sungai Mahakam.

"Untuk kegiatan pembangunan Kolam Retensi Sempaja dari BWS KIII ini sudah dimulai," ujar Anang, Selasa (25/6).

Dia menyatakan, sesuai kesepakatan rapat pada pekan lalu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, untuk memudahkan pembangunan Kolam Retensi Sempaja, Pemkot Samarinda akan bertugas untuk merelokasi warga yang tinggal di tepian sungai. Khususnya, adalah warga yang membangun rumah di belakang sungai Pasar Segiri.

"Tinggal di Pemkot Samarinda kapan relokasi rumah-rumah dibelakang Pasar Segiri itu bisa dimulai. Sehingga kami dari BWS KIII tahun 2020 bisa mulai melaksanakan turap di Sungai Karang Mumus," papar Anang.

Dia menjelaskan, kontrak ini dimulai pada 27 Mei 2019, dengan nilai kontrak Rp7,8 miliar. Adapun sumber pendanaan kolam retensi ini berasal dari DIPA SBSN Tahun Anggaran 2019. Pelaksanaan pembangunan ditargetkan selama 217 hari, dengan kontraktor pelaksana adalah PT Sarana Jaya Mandiri. Sementara itu untuk konsultan pengawas adalah PT Tatabumi Konsultan.

PROGRAM TERTUNDA

Anang mengaku sejak 2005 sudah ada rencana induk pengendalian banjir tapi belum terealisasi. Dia mengatakan

► Pembangunan bendungan adalah solusi untuk banjir di hulu sungai.

► Ada lima rencana embung dan kolam retensi yang kini sudah mengalami perubahan kondisi lahan.

bahwa BWS Kalimantan III telah menyusun pengendalian dari hulu, tengah, dan hilir sungai. Adapun pembangunan bendungan adalah solusi untuk banjir di hulu sungai. Sementara itu di area hilir sungai, BWS Kalimantan III memperlebar aliran di zona utama, misalnya dengan membangun embung.

Dalam rencana induk itu tercantum sejumlah agenda pembangunan embung atau bendungan sebagai solusi menangan banjir. Berdasarkan data dari BWS III Kalimantan, rencana induk pengendalian banjir sejak 2005 itu memiliki 17 rencana pembangunan embung dan kolam retensi.

Beras mencat, beberapa embung dan kolam retensi yang sudah terealisasi antara lain kolam retensi Sempaja, kolam retensi Air Hilam, kolam retensi Gang Indra, Bendah H.M. Andars, kolam retensi Stadion Sempaja, dan kolam retensi Vorvo.

Sementara itu ada lima rencana embung dan kolam retensi yang kini sudah mengalami perubahan kondisi lahan. Lima rencana yang terhambat itu antara lain Embung Pampang, rencana Embung Muang, rencana revitalisasi Rawa Bengkuring, rencana Embung Sempaja, dan rencana Bendah Damanhuri.

"Embung Sempaja telah berubah peruntukan lahannya. Kolam retensi Damanhuri sudah menjadi pemukiman. Embung Muang juga menjadi area tambang batu bara. Tambung Bengkuring juga sebagian



Seorang pengendara mendorong motornya yang mogok akibat melintas di banjir yang terjadi di kawasan Simpang Lembuswana, Samarinda, Kalimantan Timur.

lahannya jadi pemukiman, dan Embung Pampang Kanan ini sudah menjadi kebun kelapa sawit," jelas Anang.

Anang menilai bahwa beberapa lokasi yang mengalami alih fungsi seperti pemukiman maka pemkot harus mengganti dengan lokasi lahan yang baru. Guna merealisasikan hal itu, Anang menyebutkan tiga solusi.

Pertama, pembebasan lahan yang memungkinkan saat ini dan punya dampak signifikan pada pengendalian banjir.

Kedua, selanjutnya Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim perlu melindungi kawasan tersebut dan kawasan penyangga sungai dalam RTRW.

Ketiga, perlu ada pendekatan kepada masyarakat untuk mengatasi dampak sosial relokasi.

"Kalau itu sudah tidak bisa, cari lokasi lain sepadan dengan itu. Maka semestinya jika sudah masuk masterplan harus dikoordinasikan dengan tata ruang, jangan dipakai yang lain," terang Anang.

Dia mengaku, sudah berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda agar jangan mengokupasi lokasi yang telah menjadi rujukan rencana induk untuk pembangunan yang lain atau alih fungsi lahan. Meski demikian dia menyebut Pemkot Samarinda masih melakukan kajian dan belum menemukan lokasi pengganti atau solusi yang akan ditempuh.

"Pemkot akan coba mempelajari, kalau memungkinkan untuk dibebaskan, ya dibebaskan tapi berat di Sempaja, sudah ramai sekali. Padat sekali. Jadi rencana kita di masterplan ini yang kami lakukan," ungkapnya.

Anang menyebut untuk jangka dekat, BWS Kalimantan akan melakukan pengerukan di Bendungan Benanga dengan dana Rp7 miliar. Pembangunan diprediksi berlangsung selama dua tahun. Dia juga memprediksi tahun depan BWS mengalokasikan dana sekitar Rp30 miliar jika Ditjen SDA Kementerian PUPR menjadikan wilayah BWS Kalimantan III sebagai prioritas pengendalian banjir.

"Untuk seluruh Kaltim, alokasi BWS kurang lebih Rp20 miliar sampai Rp30 miliar tiap tahun. Sejak tahun lalu saya sudah ajukan untuk pengendalian banjir di Samarinda. Jika siap, dana bisa dikucurkan karena takut tidak teresep," paparnya. ■

Judul	Taipan Diminta Bangun Hotel di Mandalika	Tanggal	Rabu, 26 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 22)		
Resume	Pemerintah mengundang pengusaha kelas kakap untuk membangun hotel di Mandalika		

► PENGEMBANGAN PARIWISATA

Taipan Diminta Bangun Hotel di Mandalika

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah pengusaha kelas kakap nasional diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan guna membahas pembangunan hotel, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan pantauan *Bisnis*, para pengusaha yang datang ke Istana mencakup Dato' Sri Tahir (bos grup Mayapada), Chairul Tanjung (bos grup Trans Corp.), Haryadi Sukamdani (bos grup Sahid), Budi Hartono (bos grup Djarum), Hary Tanoesoedibjo (bos grup MNC), dan sebagainya.

Di samping itu, hadir pula Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Center (ITDC) Abdulbar Mansoer.

"Beliau [Presiden] minta supaya para pengusaha bisa membuka hotel di 10 lokasi [pariwisata] baru, khususnya NTB. Ya, karena NTB sudah menyiapkan infrastrukturnya, *airport* akan diperbesar, jadi Presiden minta partisipasi para pengusaha hotel untuk segera buka hotel supaya ramai," kata Tahir saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa (25/6).

Pemerintah menargetkan dapat menggelar kompetisi MotoGP di Mandalika pada 2021. Tahir mengatakan dirinya mengingatkan Direktur Utama ITDC bahwa pergelaran balapan seperti itu mengalami kerugian di seluruh dunia dan menjadi beban pemerintah.

Dengan kata lain, dia menilai pemerintah perlu mengembangkan bisnis lain selain penyelenggaraan MotoGP. Di samping hotel, bisnis lain yang perlu dikembangkan adalah MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Haryadi Sukamdani menam-

bahkan, Presiden meminta para pengusaha meningkatkan investasi di KEK Mandalika, khususnya pembangunan hotel. Hingga saat ini, jumlah hotel ada di KEK Mandalika hanya 3 unit.

"Nah ini [berkaitan] dengan adanya rencana MotoGP dan F1. Karena [di Mandalika] kekurangan hotel, mereka minta kita-kita pengusaha hotel dan properti untuk investasi."

Menurutnya, persoalan di Mandalika adalah minimnya atraksi sehingga cukup sulit untuk menarik wisatawan mancanegara. (Amanda K. Wardhani/Yodie Hardiyani)

Judul	Antisipasi Kekeringan	Tanggal	Rabu, 26 Juni 2019
Media	Republika		
Resume	Sejumlah daerah berstatus siaga dan awas kekeringan		

Antisipasi Kekeringan

• INAS WIDYANURATIKAH,
MUHAMMAD NURSYAMSYI

Sejumlah daerah berstatus siaga dan awas kekeringan.

JAKARTA — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan semua pihak mewaspadai potensi kekeringan akibat musim kemarau. Berdasarkan pemantauan BMKG, sebanyak 35 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal menjelaskan, telah terjadi hari tanpa hujan (HTH) di beberapa wilayah yang berdampak pada potensi kekeringan meteorologis (iklim). "Ada beberapa daerah yang berstatus siaga hingga awas," kata Herizal, Selasa (25/6).

Ada lima daerah yang berstatus awas kekeringan karena telah mengalami HTH lebih dari 61 hari dan prospek peluang curah hujan rendah kurang dari 20 mm per dasarian pada 20 hari mendatang.

Kelima daerah tersebut adalah sebagian besar wilayah Yogyakarta, Jawa Timur (Sampang dan Malang), Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat (Indramayu), dan Bali (Buleleng).

Sementara, daerah yang berstatus siaga kekeringan, antara lain, Jakarta Utara dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Status siaga ditetapkan karena daerah tersebut telah mengalami HTH lebih dari 31 hari.

Ia menjelaskan, musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Beberapa daerah diprediksi berpeluang mendapatkan curah hujan. Pada umumnya, prospek akumulasi curah hujan 10 hari ke depan berada pada kategori rendah atau kurang dari 50 mm.

Herizal mengimbau masyarakat waspada dan berhati-hati terhadap dampak kekeringan. Kekeringan bakal berdampak pada sektor pertanian dengan sistem tadah hujan dan kurangnya ketersediaan air tanah atau kelangkaan air bersih. "Juga peningkatan potensi terjadinya kebakaran," ujar dia.

Musim kemarau telah membuat sejumlah daerah mengalami kekeringan. Di Kabupaten Lombok Timur, NTB, ada dua kecamatan yang terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Jerowaru dan Keruak.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur Purnama Hadi mengatakan, kedua kecamatan itu menjadi wilayah yang rutin terdampak kekeringan begitu musim kemarau tiba. "Dua wilayah itu sudah mulai kekeringan sejak sekitar dua pekan lalu," kata Purnama.

Ia mengungkapkan, kekeringan melanda area persawahan yang biasa digunakan warga untuk bercocok tanam. Selain itu, kekeringan juga melanda area permukiman. Akibatnya, warga kekurangan air bersih. "Kami sudah suplai air bersih setiap hari sebanyak 10 tangki mobil air

bersih," kata Purnama.

Di Kota Cimahi, Jawa Barat, musim kemarau mulai berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pokok. Seorang pedagang di Pasar Atas, Cucu, mengungkapkan, harga sayur-mayur mengalami kenaikan harga. Ia mengatakan, harga pare yang biasanya dijual Rp 8.000 per kg naik menjadi Rp 16 ribu per kg.

Bahan pokok lain yang harganya naik adalah cabai panjang dari semula Rp 30 ribu menjadi Rp 80 ribu-Rp 90 ribu per kg. "Mungkin harga naik karena musim kemarau sehingga barang menjadi langka, sementara permintaan banyak," kata dia.

Salah seorang konsumen, Nunung, membenarkan adanya kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Pasar Atas Kota Cimahi. Ia sangat berharap harga-harga bahan pokok segera stabil.

"Kalau mahal, di warung susah jualnya. Kalau untuk masak sendiri *gak* terlalu dipikirkan. Mudah-mudahan harga cepat turun," ujarnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy mengatakan, Kementan sudah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi kekeringan. Menurut dia, Kementan telah membangun pompa air untuk menyedot air dari sungai atau sumber mata air lain dan mengalirkannya ke lahan pertanian.

"Khususnya lahan yang terletak di daerah dengan potensi kekeringan tinggi," ujar Sarwo.

Selama tiga tahun, kata dia, pemerintah melalui Kementan membangun infrastruktur air seluas tiga juta hektare. Dia yakin infrastruktur tersebut dapat meminimalkan dampak kekeringan di area pertanian. "Setidaknya 3,1 juta hektare lahan dapat merasakan manfaatnya," katanya.

Dalam jangka pendek, Kementan menurunkan tim khusus penanganan kekeringan di wilayah sentra produksi padi. Mereka bertugas melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah setempat dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tim tersebut akan bekerja sama memetakan potensi permasalahan kekeringan di sejumlah daerah dan menyiapkan solusi berupa penggelontoran air dari bendungan. Sebab, menurut Sarwo, salah satu penyebab kekeringan di lahan-lahan pertanian adalah sistem pengaliran air yang terhambat.

Langkah lain yang dilakukan adalah memfasilitasi asuransi usaha tani padi (AUTP). Asuransi ini memungkinkan petani mendapatkan ganti rugi apabila terdampak musibah kekeringan ataupun banjir. "Fasilitas ini supaya tidak mengganggu produksi pangan nasional," ujar Sarwo.

Untuk mendapatkan AUTP, petani cukup membayar premi Rp 36 ribu per hektare per musim. Tarif tersebut dinilainya cukup terjangkau. Petani akan mendapatkan ganti rugi hingga Rp 6 juta per hektare apabila sawahnya terkena dampak kekeringan, banjir, atau serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). ■ m fauzi ridwan/adinda pryanka ed: satria kartika yudha



Petani Urutan Airi Sawah

Hlm- 8

Judul	Kalimantan Tengah Kebut Cetak Biru	Tanggal	Rabu, 26 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 10)		
Resume	Pemprov Kalteng bergerak cepat untuk memenuhi segala persyaratan menjadi ibu kota Indonesia masa depan		

Kalimantan Tengah Kebut Cetak Biru

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat untuk memenuhi segala persyaratan menjadi ibu kota Indonesia masa depan.

SURYA SRIYANTI
sriyanti@mediaindonesia.com

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sedang mempersiapkan untuk membuat cetak biru (*blue print*) yang merupakan kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan. Cetak biru ini diperlukan Kalteng bila nantinya pemerintah pusat menunjuk daerah ini sebagai ibu kota pemerintahan masa depan.

Hal itu dikatakan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya, kemarin. "Kita sudah sam-

paikan hal ini (pembuatan cetak biru) kepada Presiden dan beliau memerintahkan Kepala Bappenas untuk membantu Kalteng," ujarnya.

Saat bertemu Presiden Jokowi itu Sugianto menawarkan tiga daerah di wilayahnya untuk dijadikan ibu kota Indonesia yang baru. Tiga daerah yang ditawarkan, antara lain Palangka Raya dengan luas area sekitar 66 ribu hektare (ha), Kabupaten Katingan dengan luas area sekitar 120 ribu ha, dan Kabupaten Gunung Mas dengan luas area sekitar 121 ribu ha.

"Kami siapkan, saya jawab waktu itu sekitar 300 ribu ha-500 ribu ha. Kenapa disiapkan 300 ribu ha-500 ribu ha? Pak menteri tadi menyampaikan bahwa kita butuh cuma 40 ribu ha (untuk ibu kota)," kata Sugianto.

Dijelaskan Sugianto, kelemahan Kalteng dengan daerah lain karena selama ini tidak mempunyai cetak biru, padahal ini sangat diperlukan. Dengan adanya *blue print* Kalteng, akan diketahui mana daerah permukiman, perkantoran,

Nantinya dengan memiliki *blue print*, akan diketahui secara persis potensi dan kekuatan yang dimiliki Kalimantan Tengah.

infrastruktur, dan perekonomian. Hal ini supaya tidak ada tumpang-tindih pembangunan dan fungsinya," ujar dia.

Selain terkait dengan penataan infrastruktur, imbuh Sugianto, nanti siapa pun ke depannya yang menjabat gubernur sudah mempunyai patokan untuk membuat kebijakan terutama peruntukan wilayah.

Ia kemudian mencontohkan ada pejabat yang memberikan izin perkebunan ternyata di bawahnya ada deposit tambangnya. Selain itu, menurutnya, nantinya dengan Kalteng memiliki *blue print*, akan

diketahui secara persis potensi dan kekuatan Kalteng.

Sekadar mencontohkan, nantinya bila ada investor mau masuk di bidang agrobisnis, mereka bisa datang ke Kabupaten Pulang Pisau, atau bila mau melakukan pengalengan ikan air tawar bisa di Sampit (Kotawaringin Timur) "Ini bisa jadi kekuatan untuk kita (Kalteng) ke depannya. Nah, inilah selama ini yang belum ada," katanya.

Sementara itu, Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong menegaskan bila nantinya wilayahnya dijadikan lokasi ibu kota, pihaknya sudah siap dengan segala yang diperlukan. Di Gunung Mas, kata bupati yang baru dilantik satu bulan itu, sekarang sedang dibangun PLTU berkekuatan 2 x 100 mw. "Selain itu, isu kurangnya air tawar yang selama ini diembuskan tidak benar karena kita punya delapan sungai besar dan juga tiga air terjun sebagai cadangan air," jelasnya.

Berpeluang

Keberadaan Kalimantan Tengah yang diincar pemerintah

pusat sebagai ibu kota negara masa depan sudah lama disebut. Bahkan, kajian kewilayahan dan lainnya juga sudah dilakukan Bappenas dalam beberapa tahun terakhir ini.

Mantan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang juga mengatakan Provinsi Kalteng telah siap dijadikan ibu kota pemerintahan Indonesia sejak 1957. "Kalau ada yang keberatan dengan pemindahan ibu kota pemerintahan Indonesia ke Kalteng, justru bagus. Justru dengan adanya keberatan itu, dilakukan inventarisasi," kata Teras Narang se usai menjadi narasumber seminar nasional menyambut Ibu Kota Pemerintahan NKRI di Palangka Raya, belum lama ini.

Adapun sejumlah alasan keberatan beberapa pihak terkait dengan pemindahan ibu kota pemerintahan Indonesia ke Kalimantan Tengah, yakni tidak adanya cetak biru atau kerangka kerja terperinci, kekhawatiran masyarakat adat, ataupun lokal semakin cepat terpinggirkan atau termarginalkan. (N-1)

Judul	Warga Konsumsi Air Sungai	Tanggal	Rabu, 26 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 10)		
Resume	Pemda perlu mengambil inisiatif dalam mengatasi dampak kekeringan yang sudah dirasakan warga di beberapa daerah		

Warga Konsumsi Air Sungai

Pemerintah daerah dan pihak terkait perlu mengambil inisiatif dalam mengatasi dampak kekeringan yang sudah dirasakan warga di beberapa daerah.

SUPARDJI RASBAN

supardji@mediaindonesia.com

MUSIM kemarau tidak hanya menyebabkan lahan pertanian mengalami kekeringan. Beberapa daerah di Tanah Air sudah mulai merasakan krisis air bersih. Ratusan warga Sigentong, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terpaksa memanfaatkan air Sungai Sigentong. Warga memanfaatkan air Sungai Sigentong selain untuk keperluan sehari-hari, seperti mandi, memasak, juga memanfaatkan untuk dikonsumsi atau diminum.

Seorang warga Desa Sigentong, Walim, menuturkan Sungai Sigentong tersebut merupakan satu-satunya sumber air yang bisa dimanfaatkan warga. Itu pun bergilir tiga hari sekali menunggu air di sungai cukup untuk diambil.

"Tadinya tiap hari bisa diambil airnya, sekarang tidak bisa lagi," ujar Walim, kemarin. Dia menuturkan, meski airnya keruh, warga tetap memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan rumah tangga, seperti mandi dan memasak termasuk untuk diminum.

Menurut Walim, warga terpaksa mengambil air sungai karena jika membeli harus merogoh kocek. "Padahal, kebanyakan orang di sini kurang mampu," jelasnya. Untuk itu, warga berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal membantu memasok air bersih secara rutin selama mengalami krisis air bersih.

Memasuki awal musim kemarau ini, dua desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, juga sudah mengalami krisis air bersih. Ba-

dan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro menyatakan pihaknya mulai mewaspadai bencana kekeringan yang mulai terjadi di beberapa wilayahnya.

Krisis air bersih di kawasan ini berpotensi terjadi di 114 dusun dari 71 desa yang tersebar pada 17 kecamatan di kabupaten setempat. "Iya, kita mulai mewaspadai bencana kekeringan dan krisis air bersih," kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Bojonegoro, MZ Budi Mulyono, kemarin.

Dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, warga di Kecamatan Pabuaran juga mengalami krisis air bersih. Untuk mendapatkan air bersih warga harus mencari ke lokasi yang cukup jauh dari desa mereka. Sumur-sumur milik warga mulai mengering.

Dalam keadaan terdesak warga terpaksa membeli air dari depot air isi ulang dengan ukuran 1 galon dihargai Rp10 ribu. "Air bersih sudah susah didapat. Untuk minum bisa beli dari depot isi ulang meski harganya naik dua kali lipat," kata Asep Uban, salah seorang warga Desa Kedawung.

Sedot air telaga

Kekeringan yang melanda areal pertanian di sekitar Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, disiasati petani di sana dengan menyedot air Telaga Merdada untuk menyelamatkan tanaman kentang mereka. Air dari telaga dialirkan hingga sejauh 1 hingga 5 kilometer.

Faisal, 54, seorang petani asal Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, mengatakan ada ratusan petani yang mengambil air dari Telaga Merdada. Air tersebut untuk menyelamatkan tanaman kentang mereka karena saat ini sudah tidak ada hujan.

Hal yang sama dilakukan petani di Cirebon, Jawa Barat, yang mulai menggunakan pompa air untuk membasahi sawah mereka. "Air di saluran irigasi sudah tidak bisa lagi masuk ke sawah," ungkap Casma salah seorang petani.

Kadinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Ali Efendi, membenarkan kondisi tersebut. Menurut dia, kemarau tahun ini lebih cepat dua bulan sehingga suplai air untuk areal pertanian berkurang lebih cepat. (Tim Media/N-1)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 26 Juni 2019
Media	Tempo		
Resume	Tebing Keraton dalam zona Patahan Lembang akan direhabilitasi untuk mengendalikan alih fungsi hutan menjadi resor wisata dan permukiman		

TEMPO/PRIMA MULIA



Rehabilitasi Hutan. Wisatawan berfoto di Tebing Keraton dalam zona Patahan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin. Hutan lindung seluas 1.033 hektare itu bakal direhabilitasi untuk mengendalikan alih fungsi hutan menjadi resor wisata dan permukiman.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 26 Juni 2019
Media	Kompas		
Resume	Waduk Botok mengering akibat musim kemarau di Kedawung, Sragen, Jawa Tengah, Kemarin		



ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA

WADUK BOTOK MENERING: Warga memanfaatkan area Waduk Botok yang mengering untuk bercocok tanam di Kedawung, Sragen, Jawa Tengah, kemarin. Kondisi waduk tersebut mulai mengering dan mengancam 2.488 hektare sawah pertanian yang berada di Kecamatan Kedawung dan Kecamatan Karangmalang yang menjadi daerah irigasi Waduk Botok.

Judul	Sedimentasi Limboto Belum Teratasi	Tanggal	Rabu, 26 Juni 2019
Media	Kompas		
Resume	Pendangkalan Danau Limboto di Gorontalo masih menjadi masalah utama nelayan, berakibat penurunan tangkapan		

LINGKUNGAN DANAU

Sedimentasi Limboto Belum Teratasi

GORONTALO, KOMPAS — Direvitalisasi sejak 2012, pendangkalan Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo masih menjadi masalah utama nelayan. Pengerukan danau dan pembangunan dam pengendali untuk mengatasi sedimentasi terhenti sementara karena pergantian pemegang tender.

Kedangkalan air terlihat jelas di bagian danau yang termasuk area Desa Hutada'a, Kecamatan Telaga Jaya, Selasa (25/6/2019) siang. Belasan perahu bersandar di atas tanah berpasir dan berbatu yang dikelilingi air setinggi 5 sentimeter. Benih-benih ikan berenang di air dangkal dikelilingi hamparan eceng gondok dan semak lebat.

Ais Hulopi (25) dan Junaedi Musa (20) mendorong perahu ke tepi danau karena tak dapat lagi dinaiki untuk dipindahkan dengan dayung. "Sudah turun ke danau dari pukul 08.00 (Wita), tetapi tidak dapat apa-apa. Lebih baik kami pulang saja," kata Hulopi.

Terakhir kali mencari ikan di Danau Limboto, Hulopi hanya menangkap tujuh mujair dan nila. Mencari ikan semakin sulit di tepi desa karena pendangkalan. Beberapa tahun lalu, air

masih bisa menggenang hingga tepi jalan inspeksi.

Tak jauh dari sana, Samin (42) dan Ais (31) juga memutuskan ke darat, tidak mendapat tangkapan lagi. Mereka menjual 3 kilogram nila dan mujair hasil berlayar pagi kepada pengepul dengan harga Rp 150.000.

"Sepuluh tahun lalu bisa 10 kg sehari. Sekarang susah, paling 6-7 kg," kata Samin.

Ais menambahkan, beberapa tahun pemerintah mengeruk danau. Setahun terakhir terhenti. Eceng gondok menjalar ke segala penjuru danau.

"Daerah danau yang dikeruk di sekitar Desa Pentadio Barat (Kecamatan Telaga Biru). Kami harap pemerintah segera melanjutkan proyek," katanya.

Kemarin, dua ekskavator teronggok di tepi danau, tidak difungsikan. Muhammad Pakaya (73), mantan Kepala Dusun 1 Desa Pentadio Barat yang terlibat pengerukan, mengatakan, pengerukan dihentikan 2018 karena pergantian pemegang tender revitalisasi danau.

Kepala Hubungan Masyarakat Balai Wilayah Sungai Sulawesi II (BWSS II) Olden Winarto mengatakan, pendangkalan Danau Limboto disebabkan

sedimentasi lumpur dari 23 sungai yang bermuara di sana. Catatan *Kompas* (2 Januari 2016), laju sedimentasi Danau Limboto 5.300 ton per tahun.

Revitalisasi dilanjutkan

Pada 1932, kedalaman rata-rata danau 14 meter dengan luas 7.500 hektar. Saat ini, kedalamannya sekitar 2,5 meter. Luasnya menyusut jadi 2.537,2 ha karena sedimentasi. "Danau Limboto peringkat kelima danau kritis," kata Olden.

Revitalisasi danau yang dimulai 2012 akan dilanjutkan. Paket revitalisasi mencakup pengerukan dasar danau, pembersihan eceng gondok, pembangunan dam pengendali untuk menyaring lumpur endapan (sabo dam), dan pembuatan jalan inspeksi.

Revitalisasi Danau Limboto adalah proyek strategis nasional yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan didanai APBN. Nantinya, 10 sabo dam baru akan dibangun melengkapi 13 lainnya yang telah dibangun di setiap sungai. Pembangunan Kanal Tapodu yang dilengkapi pintu air juga akan dilanjutkan. (OKA)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 26 Juni 2019
Media	Kompas		
Resume	Polusi Udara mengepung Kota Jakarta, Selasa (25/6/2019). Kondisi udara pada rentang 201-300 bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat		

Polusi Udara Selimuti Jakarta



KOMPAS/AGUS SUSANTO

Polusi udara mengepung Kota Jakarta, Selasa (25/6/2019) pukul 17.30. Menurut data AirVisual, situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia, Jakarta pada Selasa pukul 08.00 menempati urutan pertama kota dengan tingkat polusi tertinggi. Nilai Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta adalah 240 (sangat tidak sehat). Kondisi udara pada rentang 201-300 bisa memengaruhi kesehatan masyarakat.